

# PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

Saptaningsih Sumarmi<sup>\*)</sup>

## **Abstract**

*This study examined the influence of local original income, general allocation funds, and special allocation funds of the Capital Expenditure Allocation. Independent variables in this research were the local original income, general allocation funds, and special allocation funds. Dependent variable was Capital Expenditure Allocation.*

*Populations in this research were regencies or city in the province of Daerah Istimewa Yogyakarta. The sample used was a report from the APBD regency or city and regencies/city in number in the province of DIY period 2002 – 2007. Hypothesis of this research were examined by using multiple regression.*

*The results of this research indicated that the local original income and special allocation funds influenced positively significant to the capital expenditure allocation. But the general allocation funds influence negatively significant to the capital expenditure allocation.*

**Keyword:** *local original income, general allocation funds, special allocation funds, capital expenditure allocation.*

## **Latar Belakang**

Kebijakan tentang otonomi daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang dikukuhkan dengan Undang-undang (UU) telah membawa konsekuensi tersendiri bagi daerah untuk bisa melaksanakan pembangunan disegala bidang, dengan harapan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah. Kebijakan tersebut dicanangkan oleh Pemerintah melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi dengan UU Nomor 33 Tahun 2004.

Kebijakan tersebut bisa dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah tantangan, yang kedua adalah peluang bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Hal tersebut dikarenakan, dalam UU tersebut diamanatkan suatu kewenangan otonomi yaitu agar daerah melaksanakan pembangunan disegala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik (*public service*).

---

<sup>\*)</sup> Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta

Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah, baik dari sisi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya. Daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Tujuan kewenangan tersebut adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan untuk menciptakan persaingan yang sehat antardaerah, serta mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 10 menyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*) antara lain berasal dari PAD dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan itu sendiri terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu, juga terdapat sumber lain yang berasal dari pembiayaan berupa pinjaman daerah.

Oleh sebab itu, tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001). Daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat. Rendahnya kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang rendah. Daerah dituntut untuk mengotimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif.

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002).

Perubahan alokasi belanja ini juga ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi ini (Yustikasari dan Darwanto, 2007).

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal dalam APBD. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan: (1) Apakah PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal daerah?; (2) Apakah DAU berpengaruh terhadap alokasi belanja modal daerah?; (3) Apakah DAK berpengaruh terhadap alokasi belanja modal daerah?; (4) Apakah PAD, DAU, dan DAK berpengaruh secara simultan terhadap alokasi belanja modal daerah?

## **Kajian Teori dan Hipotesis**

### **1. Pengaruh PAD terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal**

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (*local own source revenue*) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan. Aziz et.al (2000); Doi (1998); Von Furstenberg (1998), menyatakan dalam hipotesis penelitiannya bahwa penerimaan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja Pemerintah Daerah dikenal dengan nama *tax spend hypothesis*. Dalam hal ini

pengeluaran Pemerintah Daerah akan disesuaikan dengan penerimaan Pemerintah Daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD (Sidik, 2002). PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2006).

Hal ini menunjukkan suatu indikasi yang kuat, bahwa jika PAD suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanja modal juga akan mengalami suatu peningkatan. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**Hipotesis 1 (H1) : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal.**

## **2. Pengaruh DAU dan DAK terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal**

Holtz-eaken et.al (1985), menyatakan bahwa terdapat keterkaitan erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan belanja pemerintah daerah. Studi yang dilakukan Legrenzi dan Milas (2001) dalam Abdullah dan Halim (2003) menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Prakoso (2004) dalam Adi dan Harianto (2007), memperoleh temuan empiris yang sama bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari Pemerintah Pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku belanja daerah terutama belanja modal dipengaruhi oleh DAU dan DAK.

Dari paparan diatas, dikembangkan hipotesis penelitian:

**Hipotesis 2 (H2) : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja modal daerah.**

**Hipotesis 3 (H3) : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal daerah**

### 3. Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Belanja Modal

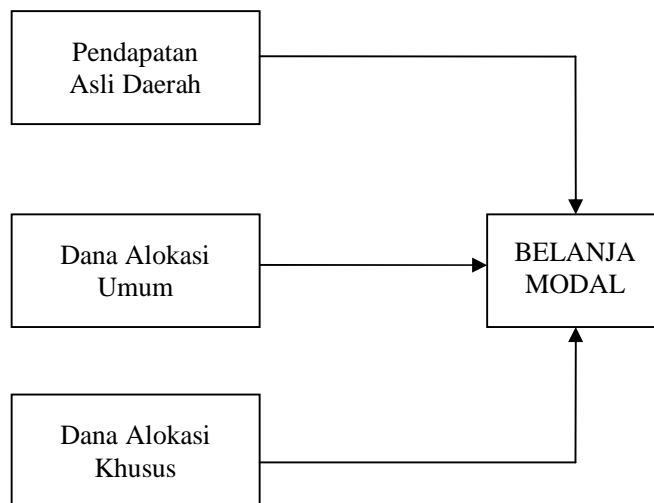
Menurut Sidik (2002), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Dari paparan diatas, dikembangkan hipotesis penelitian:

**Hipotesis 4 (H4) : PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh positif terhadap belanja modal.**

#### Model Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kajian empiris tentang PAD, DAU, DAK dan alokasi belanja modal, maka bisa dibuat suatu model penelitian:



#### Metode Penelitian

##### 1. Populasi dan Jenis Data

Daerah yang dijadikan sebagai obyek dalam penelitian ini adalah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I. Yogyakarta). Sumber

data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder yang bersumber dari laporan Realisasi APBD Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, yakni data PAD, DAU, dan Belanja Modal Daerah yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah melalui internet dan Biro Pusat Statistik (BPS). Adapun data yang digunakan adalah data *time series* dengan periode waktu dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, dan akan dikombinasikan dengan data *cross section* dari masing-masing daerah Kabupaten/Kota yang akan dijadikan populasi.

## **2. Definisi Operasional Variabel**

### **(a) Variabel Independen**

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang diukur melalui besarnya target PAD kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran.
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah dalam bentuk *block grant* yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Variabel ini diukur melalui besarnya target DAU yang diperoleh daerah kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran.
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

### **(b) Variabel Dependen**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Alokasi Belanja Modal Daerah, yaitu semua pengeluaran daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah. Variabel ini diukur melalui besarnya target alokasi belanja modal daerah kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran.

## **Hasil Analisis Data dan Pembahasan**

### **1. Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis 1 dilakukan untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Dari hasil analisis diperoleh hasil nilai uji t 3,803, dan diperoleh nilai p (sig 2-tailed) 0.001. Hal ini berarti PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal (hipotesis 1 diterima).

Pengujian hipotesis 2 dilakukan untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Dari hasil analisis diperoleh hasil nilai uji t -3,205, dan diperoleh nilai p (sig 2-tailed) 0.004. Hal ini berarti DAU berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal (hipotesis 2 ditolak).

Pengujian hipotesis 3 dilakukan untuk mengetahui apakah DAK berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Dari hasil analisis diperoleh hasil nilai uji t 5,250, dan diperoleh nilai p (sig 2-tailed) 0,000. Hal ini berarti DAK berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal (hipotesis 3 diterima).

Pengujian hipotesis 4 dilakukan untuk mengetahui apakah PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dari hasil analisis diperoleh nilai F 13,459, dan sign. F 0,000. Hal ini berarti terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  secara simultan atau secara bersama-sama dengan variabel Y (hipotesis 4 diterima).

## **2. Pembahasan**

Dari hasil analisis, pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara positif signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. Hal ini disebabkan karena PAD merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. PAD juga merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, sehingga jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih meningkatkan belanja modalnya untuk melengkapi sarana prasarana pembangunan daerah guna pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah.

Hal ini sejalan dengan Aziz et.al (2000); Doi (1998); Von Furstenberg (1998), yang menyatakan bahwa penerimaan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *tax spend hypothesis*. Dalam hal ini pengeluaran Pemerintah Daerah akan disesuaikan dengan penerimaan Pemerintah Daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

Pengujian hipotesis kedua menemukan bahwa DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. Dengan demikian hipotesis kedua ditolak. Hal ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Holtz-eaken et.al (1985), Legrenzi dan Milas (2001), Abdullah dan Halim (2003), Prakoso (2004) dalam Adi dan Harianto (2007). Tetapi, jika kita mencermati besaran nilai PAD daerah kabupaten se-D.I. Yogyakarta mengalami suatu peningkatan. Tujuan awal DAU adalah untuk pemerataan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah. Suatu daerah yang potensi fiskalnya rendah, maka DAU yang diperolehnya tinggi, dan sebaliknya jika potensi fiskalnya tinggi, maka DAU yang diperoleh daerah bersangkutan akan rendah. Hal ini menunjukkan kemandirian daerah kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta kuat, sehingga tidak tergantung DAU dari Pemerintah Pusat untuk membiayai alokasi belanja modal daerah.

Pengujian hipotesis ketiga menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. DAK diberikan dengan tujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Hal sejalan dengan temuan Holtz-Eakin et al (1995), yang menyatakan bahwa terdapat keterkaitan yang sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan belanja Pemerintah Daerah.

Hipotesis keempat menyatakan bahwa PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah, sehingga hipotesis keempat diterima. Jika PAD, DAU, dan DAK meningkat maka alokasi belanja modal daerah guna meningkatkan pelayanan publik juga bisa ditingkatkan. Dengan



demikian, model yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku belanja modal dalam APBD.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan meneliti pengaruh faktor-faktor fundamental yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Alokasi Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan persamaan regresi linier berganda dan menggunakan data panel.

Pada pengujian asumsi klasik diketahui bahwa data telah terdistribusi normal bebas dari multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan variabel PAD, DAU, dan DAK berpengaruh secara signifikan terhadap variabel alokasi belanja modal. Hasil pengujian terhadap hipotesis menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F dengan hasil nilai signifikansi 0,000 berada dibawah 0,005 yang berarti secara simultan variabel-variabel independen tersebut berpengaruh secara simultan terhadap alokasi belanja modal. Pengujian secara parsial, variabel PAD dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. Sedangkan variabel dependen DAU berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal daerah dalam APBD, sehingga hipotesis kedua ditolak.

Hasil *Adjusted R squared* ( $R^2$ ) diperoleh angka sebesar 0,563 yang menunjukkan bahwa 56,3% variabel PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama dapat menjelaskan alokasi belanja modal daerah dalam APBD, dan 43,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang ada.

### **Saran**

Saran yang diajukan untuk peneliti selanjutnya adalah dengan menambahkan daerah sampel penelitian dan rentang waktu penelitian sehingga hasil penelitian lebih dapat digeneralisir. Variabel yang digunakan dalam penelitian mendatang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi, dengan menambahkan variabel independen yang lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya, maupun variabel non-keuangan, seperti kebijakan pemerintah atau kondisi makroekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Mariam Abdul, Muzafar Shah Habibullah, W. N. W. Azman -Saini, & M. Azali, 2000. *The Causal Relationship between Tax Revenues and Government Spending in Malaysia*. Universiti Putra Malaysia, Working Paper.
- Doi, Takero. 1998. *Is Japanesse Local Finance Really Centralized? From Viewpoint of The Revenue-Expenditure Nexus*. University of Tokyo, Working Paper.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gujarati, Damodar, 1993. *Ekonometrika Dasar*, Cetakan Ketiga, Erlangga, Jakarta.
- Halim, Abdul; Nasir, Jamal Abdul. 2006. *Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang*. Manajemen Usahawan Indonesia No. 06/Th. XXXV Juni 2006.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Hariato, David. Adi, Priyo Hadi. 2007. *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per-Kapita*. SNA X Unhass Makasar 26-28 Juli 2007.
- Hastuti dan Munartono. *Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesuadaha Otonomi Daerah: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Semarang*, Seminar Riset Ekonomi II, UNAIR Surabaya.
- Holtz-Eakin, Doglas, Harvey S & Schuyley Tilly, 1994. *Intempora Analysis of State A Local Government Spending: Theory and Tests*. Journal of Urban Economics 35: 159 – 174.
- Legrenzi, Gabriella & Costas Millas. 2001. *Non-Linear and Asymmetric Adjustment The Local Revenue-Expenditure Models: Some Evidence from The Italian Municipalities*. University of Milan, Working Paper.
- Mardiasmo dan Kirana Jaya. 1999. *Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi pada Kepentingan Publik*, Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Sistem Informasi STIE “YO”, No. 21. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi, Yogyakarta.

- Markridakis, S., Whellwright, S. C., and Mc. Gee, V. E (Alih Bahasa oleh: Andriyanto Sus Untung dan Basith Abdul), 1995, *Metode dan Aplikasi Peramalan*, Jilid 1, Edisi Kedua, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal & Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia.
- Sidik, Machfud. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Makalah disampaikan dalam rangka Orasi Ilmiah. Bandung, 10 April 2002.
- Sudjana, 2002. *Metoda Statistika*. Tarsito, Bandung.
- Sulaiman, Wahid, 2004, *Analisis Regresi Menggunakan SPSS, Contoh Kasus dan Pemecahannya*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Supardi, 2008. *Kontribusi Pendapatan Retribusi Daerah terhadap PAD di Kabupaten Bantul Periode 1997 – 2005*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Akmenika, No.2. Yogyakarta.
- Syaiful, 2006. *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan*.  
<http://aset.pu.go.id/belanja.pdf>.
- Tambunan, Tulus. 2006. *Upaya-upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah*.  
[www.kardin-indonesia.or.id](http://www.kardin-indonesia.or.id).
- Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah).
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Yani, Ahmad, 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajawali Pers. PT Raja Grafindo Persada.